

**EVALUASI PROGRAM PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
KELUARGA (P2K2) DI KELURAHAN KARANG MARITIM
KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**NURMAKIA HEPI
NPM 2216041111**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2) DI KELURAHAN KARANG MARITIM KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

NURMAKIA HEPI

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan program P2K2 di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya evaluasi terhadap P2K2 sebagai bentuk pemberdayaan keluarga melalui proses pembelajaran terstruktur yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku KPM menuju kemandirian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel penelitian adalah evaluasi program P2K2 yang dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn (2018), meliputi enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Populasi dalam penelitian ini adalah KPM PKH di Kelurahan Karang Maritim dengan sampel sebanyak 222 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan hasil evaluasi program P2K2 berdasarkan persepsi responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi P2K2 di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung berada pada kategori sangat baik. Pelaksanaan P2K2 dinilai telah memberikan manfaat positif bagi KPM dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan KPM agar P2K2 tidak hanya berdampak pada perubahan sosial tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi secara lebih optimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Keluarga, Keluarga Penerima Manfaat, Program Keluarga Harapan

ABSTRACT

PROGRAM EVALUATION OF THE FAMILY DEVELOPMENT SESSION (FDS/P2K2) IN KARANG MARITIM VILLAGE, PANJANG DISTRICT, BANDAR LAMPUNG CITY

By

NURMAKIA HEPI

This study aims to measure and describe the evaluation results of the implementation of the Family Development Session in Karang Maritim Village, Panjang District, Bandar Lampung City. The research is motivated by the importance of evaluating P2K2 as a form of family empowerment through structured learning processes designed to increase knowledge and foster behavioral changes in Beneficiary Families (KPM) toward independence. This study employs a quantitative method with a descriptive approach. The research variable is the evaluation of the P2K2 program, analyzed using Dunn's (2018) policy evaluation theory, which encompasses six dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The population consists of PKH beneficiaries in Karang Maritim Village, with a sample size of 222 respondents. Data collection was carried out through questionnaires and analyzed using descriptive statistics to illustrate the evaluation results based on respondent perceptions. The results indicate that the evaluation of P2K2 in Karang Maritim Village, Panjang District, Bandar Lampung City, falls into the "Very Good" category. The implementation of P2K2 is considered to have provided positive benefits for the beneficiaries in improving their knowledge, understanding, and skills, as well as encouraging better behavioral changes. Nevertheless, there are still aspects that need improvement, particularly in fulfilling the specific needs of beneficiaries to ensure that P2K2 does not only impact social change but also optimally encourages economic independence.

Keywords: Family Empowerment, Beneficiary Families, Family Hope Program

**EVALUASI PROGRAM PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
KELUARGA (P2K2) DI KELURAHAN KARANG MARITIM
KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

NURMAKIA HEPI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **EVALUASI PROGRAM PERTEMUAN
PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA
(P2K2) DI KELURAHAN KARANG MARITIM
KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Nurmakia Hepi*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216041111

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.
NIP. 19830815 201012 2 002

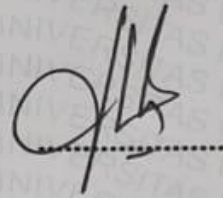
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.SI.
NIP. 19700914 200604 2001

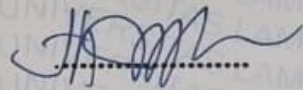
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.



Penguji : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Nurmakia Hepi
NPM. 2216041111

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurmakia Hepi, lahir di Kedamaian, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada 27 Agustus 2003. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Johansyah dan Ibu Kurnia Wati serta memiliki tiga orang kakak bernama Nanda Julfahmi, Yuspika Putri, dan Ferlian Syah.

Riwayat Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Kuripan di Kota Agung yang diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya meneruskan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Agung yang diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis pernah aktif di dua organisasi yaitu, organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) sebagai Anggota Bidang DANUS dan UKM PIK R RAYA Universitas Lampung sebagai Kepala Sub Bidang Kealumnian. Pada periode Januari-Februari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada Februari 2025 penulis juga telah melaksanakan Program Magang MBKM FISIP UNILA di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar melainkan milik mereka yang
senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

“Lebih baik melakukan sesuatu meski keliru daripada tidak melakukan apa-apa
lalu menyesal.”

(Tere Liye-Janji)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Dengan penuh hormat dan kasih sayang, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti.

Ketiga Kakak Tersayang

Karya ini saya persembahkan kepada ketiga kakak saya yang selalu memberikan dukungan dalam setiap proses yang saya jalani. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang turut menguatkan langkah saya.

Keponakan Tersayang

Karya ini juga saya persembahkan kepada keponakan saya yang dengan kehadirannya membawa keceriaan dan menjadi penyemangat di tengah proses penyusunan karya ini.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Dengan penuh rasa hormat, karya ini saya persembahkan kepada para dosen dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga penyusunan karya tulis ini.

Serta

**Almamater Tercinta,
UNIVERSITAS LAMPUNG**

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Evaluasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, arahan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta dedikasi membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan ilmu yang Ibu berikan sangat berarti bagi penulis.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia memberikan arahan dan masukan yang turut memperkaya wawasan serta memperkuat penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu dan bekal berharga yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses birokrasi penyusunan skripsi dan selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Bapak Johansyah dan Ibu Kurnia Wati. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, cinta yang tulus, serta pengorbanan tanpa henti yang telah menjadi pijakan utama dalam setiap langkah hidup saya hingga titik ini.
8. Ibu Dah Eko Ermawanti, S.Sos. MM selaku pegawai di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, terimakasih atas banyaknya kebaikan dan kehangatan yang diberikan selama magang dan diskusi akan banyak hal di hidup. Semoga hal-hal baik selalu menyertai ibu.
9. Bapak Yunanda Saputra selaku Ketua Tim PKH Kota Bandar Lampung dan Ibu Rahma selaku pendamping PKH di Kelurahan Karang Maritim yang telah memberikan izin penelitian, arahan, serta kemudahan dalam memperoleh data di lapangan. Terima kasih pula kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Karang Maritim yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini.
10. Seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama melakukan proses penelitian.
11. Ketiga kakak saya, Nanda Julfahmi, Yuspika Putri, dan Ferlian Syah. Terima kasih telah mendukung dan memberikan semangat dalam perkuliahan saya.
12. Keponakan saya, Muhammad Arpi Alfatih. Terima kasih atas keceriaan dan kepolosanmu yang menghadirkan senyum di tengah hari-hari yang panjang selama penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di kampus yaitu Alya Septiani, Aprilia Friska Dika Lesmana, Apriyana Borusimbolon, dan Putri Novianti. Terima kasih telah menjadi bagian paling berwarna dalam masa perkuliahan saya. Bersama kalian, setiap beban terasa lebih ringan dan setiap kesulitan berubah menjadi tawa. Terima kasih telah saling menguatkan di saat ingin menyerah, mendengarkan setiap keluh kesah, dan berjuang bersama hingga kita sampai di titik ini.

14. Irnaily Sabilla Elleny Subing, sahabatku sejak masa KKN. Terima kasih telah membuat masa pengabdian yang penuh tantangan menjadi momen yang menyenangkan untuk dikenang. Kehadiranmu bukan sekadar teman seperjalanan, melainkan penguat yang membuat hari-hari sulit terasa lebih bermakna.
15. Kenita Hupeza, sahabat SMA-ku. Terima kasih telah hadir di momen penting dalam perkuliahan ini. Kehadiranmu membuktikan bahwa dukungan tidak selalu harus lewat kata-kata setiap hari, tapi ada melalui kehadiran di saat-saat paling berarti.
16. Teman-teman seperjuangan skripsi Meitha Agnes, Rina, Nedia, Sabrini, Nia, dan sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas banyaknya saran, diskusi, dan kebersamaan selama menjalani proses skripsi ini.
17. Terakhir, apresiasi tulus untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah mampu berkomitmen, menjaga semangat, dan tetap melangkah meskipun tantangan datang silih berganti. Terima kasih sudah memilih untuk terus berproses dan percaya pada kemampuan diri sendiri hingga perjuangan ini selesai. Saya bangga telah berhasil menyelesaikan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Negara.

Bandar Lampung, 13 Mei 2026

Penulis,

Nurmakia Hepi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kebijakan Publik	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	11
2.2.2 Dampak-Dampak Kebijakan Publik.....	12
2.2.3 Jenis Kebijakan Publik	13
2.2.4 Proses Perancangan Kebijakan Publik	13
2.3. Evaluasi Kebijakan Publik	14
2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik	14
2.3.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan.....	16
2.3.3 Teori Evaluasi Kebijakan	17
2.4 Konsep Pemberdayaan	22
2.5 Tinjauan P2K2.....	25
2.6. Kerangka Berpikir	27

III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	29
3.2.1 Definisi Konseptual	29
3.2.2 Definisi Operasional	32
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.4.1 Populasi	37
3.4.2 Sampel	37
3.5 Sumber Data Penelitian	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Skala Pengukuran	39
3.8 Uji Prasyarat Instrumen	41
3.8.1 Uji Validitas	41
3.8.2 Uji Reliabilitas	44
3.9 Teknik Analisis Data	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Karang Maritim.....	47
4.1.1 Kondisi Geografis.....	49
4.1.2 Tingkat Perkembangan Kelurahan	49
4.2 Profil P2K2.....	54
4.2.1 Tujuan P2K2.....	54
4.2.2 Fungsi P2K2	55
4.2.3 Sasaran P2K2.....	55
4.2.4 Teknis Pelaksanaan P2K2	55
4.2.5 Materi P2K2	55
4.2.6 Pemateri P2K2.....	57
4.2.7 Tahapan P2K2	57
4.3 Pelaksanaan Program P2K2 di Kelurahan Karang Maritim.....	58
4.4 Hasil Penelitian.....	61
4.4.1 Deskripsi Responden	61
4.4.2 Hasil Penelitian Deskriptif	63

4.4.3 Analisis <i>Crosstab</i>	101
4.4.4 Pembahasan	106
V. KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerima Bantuan Sosial PKH Kota Bandar Lampung 2025	3
2. Penelitian Terdahulu	8
3. Operasionalisasi Variabel.....	32
4. Skor Pengukuran Skala Likert.....	40
5. Kategori Evaluasi Program	41
6. Hasil Uji Validitas	42
7. Hasil Uji Reliabilitas	45
8. Sebaran Penduduk Kelurahan Karang Maritim Menurut Usia	50
9. Sebaran Penduduk Kelurahan Karang Maritim Menurut Agama	50
10. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Karang Maritim	51
11. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Karang Maritim.....	52
12. Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Maritim	52
13. Bidang Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial Karang Maritim	53
14. Daftar Modul Program P2K2 KPM PKH	59
15. Jadwal P2K2 Kelurahan Karang Maritim Tahun 2024-2025.....	60
16. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
17. Responden Berdasarkan Usia.....	62
18. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	62
19. Responden Berdasarkan Pekerjaan	63
20. Hasil Hitung Indikator Pengetahuan KPM.....	64
21. Hasil Hitung Indikator Pemahaman Hak dan Kewajiban PKH	68
22. Hasil Hitung Indikator Perubahan Perilaku Positif KPM	71
23. Hasil Hitung Indikator KPM Mengenali Potensi Diri dan Lingkungan.....	73

24. Hasil Hitung Indikator Ketepatan Pelaksanaan P2K2.....	75
25. Hasil Hitung Indikator Upaya Pendamping PKH dalam P2K2	78
26. Hasil Hitung Indikator P2K2 Mencukupi Kebutuhan KPM	80
27. Hasil Hitung Indikator Manfaat P2K2 Didistribusikan Rata	83
28. Hasil Hitung Indikator Respon KPM Terhadap P2K2.....	87
29. Hasil Hitung Indikator Respon Pendamping Pada Keluhan KPM.....	89
30. Hasil Hitung Indikator P2K2 Sesuai Dengan Kebutuhan KPM	93
31. Hasil Hitung Indikator Pemahaman KPM Pada P2K2.....	95
32. Descriptive Statistics	98
33. Kategori Evaluasi Program	100
34. <i>Crosstab</i> Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	101
35. <i>Crosstab</i> Responden Berdasarkan Usia	102
36. <i>Crosstab</i> Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	103
37. <i>Crosstab</i> Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Jumlah KPM PKH Kota Bandar Lampung 2021–2025.....	2
2. Kerangka Berpikir	27
3. Struktur Organisasi Kelurahan Karang Maritim	47
4. Pelaksanaan Kegiatan P2K2 di Kelurahan Karang Maritim	58
5. Pola Asuh Positif Terhadap Anak	64
6. Pengetahuan Cara Mendidik Anak.....	65
7. Pemahaman Dalam Mengatur Keuangan Keluarga	65
8. Pengetahuan Cara Mencegah Stunting.....	66
9. Pengetahuan Memberikan Perawatan Lansia.....	66
10. Pemahaman Cara Memenuhi Hak-Hak Disabilitas.....	67
11. Pengetahuan Makanan Bergizi Seimbang.....	67
12. Pemahaman Hak Mendapatkan Materi P2K2	69
13. Pemahaman KPM Terhadap Kewajiban Hadir P2K2	69
14. Pemahaman Tentang Peraturan PKH.....	70
15. Praktik Kebiasaan Membuang Sampah Pada Tempatnya.....	71
16. Perilaku Tidak Menggunakan Kekerasan Pada Anak	72
17. KPM Menabung Uang Bantuan Untuk Dana Darurat	72
18. KPM Mengenal Keterampilan Diri dan Keluarga	73
19. Pemanfaatan Fasilitas Lingkungan Sekitar	74
20. Pertemuan P2K2 Dilaksanakan Secara Rutin	76
21. Pertemuan P2K2 Dilakukan Tepat Waktu	76
22. Durasi Sesi P2K2 Digunakan Untuk Membahas Modul.....	77

23. Penyampaian Materi Mudah Dimengerti KPM	78
24. Penjelasan Materi menggunakan Alat Bantu	78
25. Ketersediaan Modul Membantu KPM Belajar Mandiri	80
26. Materi P2K2 Menjawab Kebutuhan KPM	81
27. Keterampilan Mengelola Keuangan Secara Mandiri	81
28. Pengetahuan Pengasuhan Anak Yang Memadai	82
29. Pemerataan KPM Dalam Menyampaikan Pendapat	83
30. Pemerataan Penerimaan Materi P2K2.....	84
31. Pemerataan Bimbingan Pendamping Kepada KPM.....	85
32. Pemerataan Pelayanan Dari Pendamping PKH.....	85
33. Pemerataan Informasi Pada P2K2.....	86
34. Respon KPM Terhadap Pelaksanaan P2K2	87
35. KPM Memperhatikan Materi P2K2	88
36. Keaktifan KPM Bertanya Kepada Pendamping.....	88
37. Respon Pendamping Terhadap Keluhan KPM.....	90
38. Arahan Jelas Pendamping Saat Kendala P2K2	90
39. Pendamping PKH Menerima Saran KPM.....	91
40. Solusi Pendamping PKH Terhadap Permasalahan KPM.....	91
41. Kebutuhan Materi P2K2 Bagi Perbaikan Keluarga KPM.....	93
42. Materi P2K2 Memberikan Informasi Baru Kepada KPM	94
43. Topik P2K2 Memberikan Solusi Kepada KPM.....	94
44. Pemahaman KPM Terkait Penjelasan P2K2	95
45. Kemampuan KPM Menjelaskan Materi P2K2.....	96
46. Pemahaman KPM Terhadap Tujuan P2K2	96
47. Pemahaman KPM mempraktikkan Materi P2K2	97

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek penting dalam praktik kehidupan bernegara (Permana, 2023). Kebijakan publik merupakan keputusan yang bersifat mengikat masyarakat luas pada tingkat strategis atau sebagai pedoman umum yang ditetapkan oleh pemegang kewenangan publik (Engkus, 2022). Kebijakan ini disalurkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok (Marwiyah, 2022). Sejalan dengan pemahaman tersebut, salah satu persoalan yang menjadi fokus perhatian kebijakan publik di Indonesia adalah kemiskinan. Kebijakan publik berperan sebagai instrumen penting bagi pemerintah untuk memantau perkembangan angka kemiskinan sekaligus mengevaluasi efektivitas penanganannya di Indonesia (Apriliani dkk., 2025).

Angka kemiskinan di Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 24,06 juta orang (8,57%) dan menurun menjadi 23,85 juta orang (8,47%) pada Maret 2025 (BPS Indonesia, 2025). Namun penurunan tersebut belum menghilangkan kemiskinan sebagai persoalan nasional yang serius dan memerlukan penanganan secara berkelanjutan. Pada Provinsi Lampung, tren serupa juga terlihat di mana jumlah penduduk miskin menurun dari 941,23 ribu orang (10,69%) pada Maret 2024 menjadi 887,02 ribu orang (10%) pada Maret 2025. Penurunan ini terjadi baik di wilayah perkotaan dari 8,18% menjadi 7,49% maupun di perdesaan dari 11,97% menjadi 11,32% (BPS Provinsi Lampung, 2025).

Persoalan kemiskinan tersebut menuntut intervensi pemerintah melalui program penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu program prioritas nasional yang dilaksanakan Kementerian Sosial sejak 2007 adalah Program Keluarga Harapan yaitu bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*). Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018, PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini juga bertujuan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, mendorong kemandirian, serta memperkenalkan layanan keuangan formal bagi keluarga miskin dan rentan (Kementerian Sosial RI, 2018).

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung dengan jumlah penerima PKH yang cukup besar. Pemerintah telah menetapkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai acuan utama dalam penetapan penerima bantuan sosial tersebut berdasarkan Permensos Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 (Kementerian Sosial RI, 2025). Data DTSEN yang diolah oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa jumlah KPM PKH mengalami perubahan dari tahun 2021 hingga 2025 sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Grafik Jumlah KPM PKH Kota Bandar Lampung 2021–2025
Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah KPM di Kota Bandar Lampung mengalami tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Jumlah KPM mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 37.989 keluarga, namun kemudian

mengalami penurunan bertahap sebesar 2.811 keluarga pada tahun 2022 menjadi 35.178 KPM. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan titik terendah sebesar 26.857 keluarga, sebelum akhirnya kembali meningkat signifikan sebanyak 4.304 keluarga menjadi 31.161 KPM pada tahun 2025.

Kecamatan-kecamatan di Kota Bandar Lampung memiliki sebaran KPM dengan jumlah yang bervariasi. Persebaran rincian jumlah KPM pada tahun 2025 di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penerima Bantuan Sosial PKH Kota Bandar Lampung 2025

No	Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Panjang	3.036
2.	Teluk Betung Timur	2.594
3.	Tanjung Karang Barat	2.150
4.	Teluk Betung Barat	2.147
5.	Kemiling	1.897
6.	Tanjung Karang Pusat	1.867
7.	Bumi Waras	1.849
8.	Teluk Betung Selatan	1.857
9.	Teluk Betung Utara	1.774
10.	Sukabumi	1.591
11.	Way Halim	1.376
12.	Tanjung Karang Timur	1.310
13.	Kedaton	1.282
14.	Rajabasa	1.188
15.	Kedamaian	1.100
16.	Langkapura	1.060
17.	Sukarame	942
18.	Tanjung Senang	777
19.	Labuhan Ratu	773
20.	Enggal	591
	Total	31.161

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (2025)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Panjang memiliki jumlah KPM tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Bandar Lampung, yakni sebanyak 3.036 keluarga. Angka ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Teluk Betung Timur (2.594 KPM) dan Tanjung Karang Barat (2.150 KPM). Sementara itu, jumlah penerima manfaat terendah berada di kecamatan Enggal yang hanya berjumlah 591 KPM. Banyaknya jumlah KPM di Panjang mengindikasikan bahwa kecamatan tersebut memikul beban tugas yang lebih berat dalam menjalankan setiap komponen PKH dibandingkan kecamatan lainnya.

PKH memiliki program pendampingan sebagai bagian penting dalam mencapai tujuan program, di mana pendamping sosial memberikan fasilitasi dan mediasi secara berkelanjutan yaitu program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang dilaksanakan setiap bulan. P2K2 dirancang sebagai proses belajar terstruktur dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku positif KPM agar mampu mencapai kesejahteraan dan kemandirian, tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial (Kementerian Sosial RI, 2018). Melalui modul-modul tematik yang mencakup kesehatan, pendidikan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial, P2K2 berfungsi sebagai ruang pemberdayaan sosial yang mendorong terjadinya perubahan perilaku KPM melalui pendekatan partisipatif (Kementerian Sosial RI, 2024).

Sejalan dengan tujuan P2K2, selain implementasi juga diperlukan evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan serta untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Heryani, 2015). Untuk mengukur evaluasi P2K2 secara lebih spesifik, salah satu teori yang bisa digunakan adalah teori evaluasi kebijakan oleh Dunn (2018) yang merujuk pada enam kriteria evaluasi yaitu 1) efektivitas digunakan untuk menilai pencapaian hasil program, 2) efisiensi mengukur besarnya usaha untuk mencapai efektivitas program, 3) kecukupan menilai sejauh mana program mampu memenuhi kebutuhan sasaran guna

menyelesaikan masalah yang ada, 4) perataan untuk menilai keadilan dalam distribusi manfaat program, 5) responsivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan menanggapi kebutuhan nyata, dan 6) ketepatan akan melihat kesesuaian nilai serta tujuan program P2K2 dengan kebutuhan substantif dan tingkat pemahaman masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan (Dunn, 2018).

Pentingnya evaluasi ini didasarkan pada temuan bahwa pemberdayaan melalui P2K2 sejauh ini lebih berimplikasi pada perubahan sosial saja namun belum memperlihatkan dampak yang nyata terhadap perubahan ekonomi KPM (Triano & Machdum, 2023). Permasalahan dalam pelaksanaan P2K2 juga tampak dari rendahnya kesiapan dan partisipasi KPM yang cenderung lebih menitikberatkan perhatian pada bantuan sosial daripada mengikuti proses pembelajaran P2K2, padahal, kegiatan ini sangat penting untuk membekali pengetahuan dan kemampuan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga KPM mampu berdaya dan bergerak menuju kemandirian (Lestarie dkk., 2024).

Berbeda dengan temuan sebelumnya, beberapa penelitian lain justru menunjukkan keberhasilan P2K2 dalam mendorong kemandirian. Penelitian Beni (2023) membuktikan bahwa program ini efektif menumbuhkan kemandirian aspek sosial dan ekonomi melalui partisipasi aktif yang membangun kesadaran hidup tanpa ketergantungan penuh pada bantuan. Senada dengan hal tersebut, Pratiwi dkk., (2025) menemukan dampak positif pada kesejahteraan lansia, di mana keluarga menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan fisik dan emosional lansia secara berkelanjutan. Keberhasilan serupa juga ditunjukkan oleh (Agusrini dkk., 2022) di mana KPM berhasil mengalami perubahan perilaku nyata, mulai dari pola pengasuhan anak yang lebih baik hingga pengembangan upaya ekonomi melalui kebiasaan menabung dan usaha bersama.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil mengenai keberhasilan program P2K2

dalam mendorong kemandirian ekonomi dan perubahan perilaku KPM. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian karena di satu sisi program dinilai berhasil secara sosial namun di sisi lain masih menghadapi hambatan dalam aspek ekonomi dan partisipasi. Perbedaan temuan tersebut mendasari pentingnya dilakukan evaluasi secara kuantitatif deskriptif melalui enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan program P2K2 di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu mengukur dan mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan program P2K2 di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu referensi bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian dalam bidang administrasi negara, khususnya terkait dengan evaluasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi penelitian ilmiah selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung sehingga dapat digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program bagi KPM PKH.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Sugiyono (2023), penelitian terdahulu dipahami sebagai studi yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain dan memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai rujukan dan landasan teoretis untuk memperkuat serta memperluas hasil penelitian yang sedang dilakukan. Melalui telaah penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami teori, konsep, dan temuan yang telah ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menentukan pendekatan yang tepat. Dengan demikian, penelitian terdahulu berperan penting dalam memberikan konteks, membangun dasar teori yang kuat, dan menjadi bahan perbandingan dalam merumuskan masalah maupun kerangka konseptual penelitian.

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterkaitan Penelitian
1.	Dampak P2K2 dalam Memenuhi Kebutuhan Lanjut Usia di Desa Kotasan (Dinda Pratiwi, Mia Aulina Lubis, dan Malida Putri, 2025)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program P2K2 memberikan dampak positif bagi lansia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan fisik (asupan gizi, kesehatan), rasa aman, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Program ini juga memperbaiki hubungan emosional antara keluarga dan lansia serta meningkatkan kepedulian keluarga dalam merawat lansia.	Relevan karena penelitian ini memberi gambaran tentang hasil dan dampak perubahan perilaku KPM setelah mengikuti P2K2.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterkaitan Penelitian
2.	Evaluasi Program P2K2 Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Tasikmalaya Sektor Wilayah Cipedes dan Mangkubumi (Trie Lestarie, Raina Putri Khoirinka, Nurul Zaqiyah, Septiana Putri, Lusiana Dewi, Al Qaromah Desidin, Egie Rizky Putri Rosidin, Muhammad Rafli Alviansyah, Nurlaila Nurlaila 2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program P2K2 berfungsi sebagai sarana pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan kesadaran KPM dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena sebagian KPM masih kurang serius mengikuti kegiatan, lebih fokus pada informasi bantuan, dan kurang siap menyerap materi.	Penelitian ini relevan karena sama-sama melakukan evaluasi terhadap program P2K2. Dalam evaluasi ini tergolong belum berhasil jika dilihat dari hasil penelitiannya.
3.	P2K2 dalam mempercepat perubahan perilaku KPM PKH (Sabinus Beni, 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan P2K2 di Kecamatan Teriak dinilai sangat efektif dalam mengubah dan mempercepat perubahan perilaku KPM. Program ini berhasil menggeser paradigma KPM dari ketergantungan pada pemerintah menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab melalui edukasi terstruktur dalam lima modul utama, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial. Keberhasilan tersebut didorong oleh pelaksanaan kegiatan yang rutin, penggunaan metode diskusi kelompok yang interaktif, serta pendekatan partisipatif yang menumbuhkan kesadaran KPM untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.	Penelitian ini relevan karena membahas mengenai kegiatan P2K2 dalam mempercepat perubahan perilaku KPM. Program ini berhasil dan sangat efektif dalam mengubah perilaku masyarakat penerima bantuan agar lebih sejahtera dan mandiri.
4.	Pemberdayaan melalui P2K2 di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang bagi KPM (Habibah Mutiara Triano & Sari Viciawati Machdum, 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan P2K2 telah berjalan cukup baik dalam mendorong perubahan sosial dan perilaku KPM. Program ini mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pola pikir KPM terkait pengasuhan anak, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan keuangan keluarga. Proses pemberdayaan berlangsung melalui tahapan pembentukan kesadaran, peningkatan kapasitas,	Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa P2K2 telah berhasil mendorong pemberdayaan KPM dalam aspek sosial, terutama perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Namun, di sisi lain, program ini belum sepenuhnya mampu mendukung perubahan pada aspek

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterkaitan Penelitian
		dan penguatan kemampuan intelektual. Namun demikian, dampak P2K2 terhadap kemandirian ekonomi KPM masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mendorong tercapainya graduasi mandiri.	ekonomi sehingga pemberdayaan yang dihasilkan masih bersifat sosial dan belum mengarah pada kemandirian ekonomi.
5.	Strategi P2K2 dalam Perubahan Perilaku KPM PKH di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung (Tutik Agusri, M. Abdul Adib, dan Achmad Sarbanum, 2022)	Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pengetahuan KPM pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Anak-anak KPM menjadi lebih rajin bersekolah, peserta aktif memanfaatkan layanan posyandu, serta tumbuhnya kegiatan ekonomi melalui e-waroeeng bersama.	Relevansinya adalah penelitian ini menggambarkan bagaimana staretgi P2K2 mampu memengaruhi perilaku KPM sehingga dapat dijadikan rujukan penelitian.
6.	Implementasi Program P2K2 di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma (Linda Triana, Aries Munandar, Lisa Adhrianti, Tamrin Bangsu, dan Yunisiliah, 2025)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program P2K2 di Sukaraja telah sesuai dengan regulasi Permensos No. 1 Tahun 2018 dan Permensos No. 10 Tahun 2017. Namun efektivitasnya masih belum optimal karena 1) materi terlalu teknis dan sulit dipahami KPM. 2) Sosialisasi dan pertemuan lebih bersifat formalitas. 3) Monitoring dan evaluasi hanya dilakukan sebulan sekali atau saat darurat. 4) Pendamping lebih banyak berfokus pada administrasi daripada pendampingan langsung. Akibatnya, meskipun ada KPM yang berhasil graduasi, banyak juga penerima baru yang masuk.	Penelitian ini relevan karena membahas bagaimana P2K2 diimplementasikan, termasuk kualitas pelaksanaan, pendampingan, dan monitoring.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan tinjauan terhadap enam penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa program P2K2 secara umum telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku KPM pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak, meskipun dalam beberapa kasus efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya kesiapan peserta serta kendala administratif pendamping. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan enam indikator evaluasi Dunn (2018) (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,

responsivitas, dan ketepatan) untuk menilai pelaksanaan P2K2 di Kelurahan Karang Maritim Kota Bandar Lampung.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek penting dalam praktik kehidupan bernegara (Permana, 2023). Definisi kebijakan publik itu sendiri merupakan keputusan yang bersifat mengikat masyarakat luas pada tingkat strategis atau sebagai pedoman umum yang ditetapkan oleh pemegang kewenangan publik (Engkus, 2022). Kemudian, kebijakan publik juga memiliki sifat mengikat layaknya hukum sehingga setiap pihak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku (Syafriyani, 2023).

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Igrisa (2022) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan “(*whatever governments choose to do or not to do*)” artinya, setiap tindakan atau keputusan untuk tidak bertindak pun termasuk dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Khasanah (2024) kebijakan publik dapat berbentuk keputusan untuk tidak bertindak terhadap suatu permasalahan yang tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat (bentuk negatif) maupun tindakan pemerintah yang bersifat otoritatif, berlandaskan hukum dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya (bentuk positif). Selain itu, Cochran dan Malone dalam Prasetyia & Pangestuty (2021) menyebutkan kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan politik yang dirumuskan untuk menjalankan program-program yang telah disepakati guna mewujudkan tujuan bersama dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan aspek penting dalam kehidupan bernegara yang tidak hanya berupa keputusan yang mengikat dan menjadi pedoman umum bagi masyarakat, tetapi juga mencakup seluruh pilihan pemerintah, baik untuk

bertindak maupun tidak bertindak dalam menghadapi suatu permasalahan. Kebijakan publik bersifat otoritatif, berlandaskan hukum, serta memiliki konsekuensi yang mengikat, sehingga setiap pelaksanaannya diarahkan untuk mewujudkan tujuan bersama melalui program-program yang telah dirumuskan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

2.2.2 Dampak-Dampak Kebijakan Publik

Dampak-dampak kebijakan publik menurut Situmorang (2016) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dilihat dari dampaknya terhadap masalah publik dan kelompok yang menjadi sasaran, sehingga perlu ditentukan secara jelas siapa yang dipengaruhi serta tujuan atau hasil yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut.
2. Kebijakan juga dapat menimbulkan dampak di luar kelompok sasaran yang disebut eksternalitas, yaitu pengaruh yang bisa bersifat positif maupun negatif bagi kelompok lain yang tidak menjadi target utama kebijakan.
3. Kebijakan memiliki dampak dalam dimensi waktu, sehingga perlu dilihat apakah pengaruhnya bersifat jangka pendek atau jangka panjang serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi saat ini maupun di masa yang akan datang.
4. Kebijakan melibatkan biaya langsung yang digunakan dalam pelaksanaannya, seperti anggaran atau sumber daya yang dapat diukur secara jelas dalam bentuk pengeluaran pemerintah.
5. Kebijakan juga menimbulkan biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat, yang seringkali sulit diukur karena berkaitan dengan dampak sosial atau konsekuensi lain yang tidak bersifat materi.

2.2.3 Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Marwiyah (2022), kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kebijakan *substantif* dan *procedural*
Kebijakan *substantif* berkaitan dengan isi atau apa yang akan dilakukan pemerintah. Sementara itu, kebijakan *procedural* mengatur cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Kebijakan *distributive*, kebijakan *regulatori* dan kebijakan *redistributive*
Kebijakan *distributive* berfokus pada pemberian layanan atau fasilitas kepada individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan *regulatori* mengatur perilaku masyarakat melalui pembatasan atau pelarangan tertentu. Kebijakan *redistributive* mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, atau hak-hak antar kelompok masyarakat.
3. Kebijakan material dan simbolik
Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan manfaat nyata dalam bentuk sumber daya yang dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran. Sementara itu, kebijakan simbolik adalah kebijakan yang menawarkan manfaat yang lebih bersifat representatif atau tidak langsung kepada kelompok sasaran.
4. Kebijakan barang umum dan barang privat
Kebijakan barang publik mengatur penyediaan layanan atau barang yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Sebaliknya, kebijakan barang privat mengatur penyediaan barang atau layanan yang dapat diperjualbelikan di pasar bebas.

2.2.4 Proses Perancangan Kebijakan Publik

Proses perancangan kebijakan merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan untuk menyusun dan mengembangkan kebijakan publik yang efektif. Adapun tahapan tersebut menurut Arafat (2023) meliputi:

1. Identifikasi dan Analisis Masalah: tahap awal dilakukan dengan mengenali permasalahan atau isu yang akan ditangani melalui kebijakan publik. Permasalahan tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengetahui akar penyebabnya, serta mengidentifikasi pihak-pihak terkait yang dapat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.
2. Penentuan tujuan dan sasaran: setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan relevan dengan permasalahan, sedangkan sasaran yang spesifik akan memudahkan dalam menilai tingkat keberhasilan kebijakan.
3. Analisis kebijakan dan alternatif: pada tahap ini dilakukan kajian terhadap berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Setiap alternatif dianalisis dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, peluang, serta tantangan yang mungkin dihadapi.
4. Perumusan kebijakan: tahap ini berfokus pada penyusunan rancangan kebijakan secara rinci. Rancangan tersebut mencakup strategi pelaksanaan, instrumen yang digunakan, alokasi sumber daya, serta langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi dan revisi: setelah kebijakan dijalankan, dilakukan evaluasi untuk menilai dampak dan tingkat keberhasilannya. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan agar lebih optimal di masa mendatang.

2.3. Evaluasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Istilah evaluasi merujuk pada penerapan berbagai skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, evaluasi dapat dipahami sebagai penaksiran, pemberian nilai, dan penilaian terhadap hasil kebijakan. Dalam

pengertian yang lebih sempit, evaluasi berkaitan dengan penyediaan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan memiliki kinerja yang bermakna apabila hasil yang dicapai berkontribusi terhadap tujuan atau sasaran sehingga masalah kebijakan dapat diperjelas atau diatasi (Marwiyah, 2022).

Evaluasi dapat dipahami tidak hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga dari perspektif substantif. Secara teknis, evaluasi merupakan suatu prosedur analitis yang mencakup kegiatan penaksiran, pemberian skor, hingga penilaian menggunakan angka-angka tertentu. Sementara itu, secara substantif, evaluasi merupakan proses untuk menilai dan mengungkapkan nilai atau manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan (Igirisa, 2022). Selain itu, evaluasi kebijakan merupakan proses untuk memahami konsekuensi kebijakan publik melalui penilaian yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap dampak kebijakan berdasarkan tujuan yang ditetapkan (Dye dalam Dilapanga & Rantung, 2022).

Menurut Situmorang (2016), evaluasi bertujuan untuk mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan sejauh mana tujuannya tercapai. Evaluasi dilakukan tidak hanya di akhir tetapi juga selama proses kebijakan berlangsung. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data tentang efektivitas, efisiensi, dampak, dan relevansi kebijakan. Hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan serta penilaian apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, dihentikan, atau dirancang ulang agar lebih sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Situmorang, 2016).

Merujuk pada pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan tahapan dalam siklus kebijakan yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana sebuah intervensi pemerintah memberikan dampak nyata. Melalui proses penaksiran dan penilaian yang sistematis, evaluasi tidak hanya menyediakan data mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian target tetapi juga menjadi alat navigasi bagi pengambil kebijakan untuk menentukan langkah perbaikan di masa depan. Dengan demikian, evaluasi membantu

menilai agar kebijakan publik tetap relevan, dan benar-benar mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Jones (1991) dalam Dilapanga & Rantung (2022) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan memiliki setidaknya tiga tujuan utama:

1. Evaluasi politis (political evaluation), yaitu evaluasi yang menilai apakah suatu program memberikan manfaat secara politis, seperti membuka peluang dukungan publik, perhatian media, atau kepentingan politik tertentu.
2. Evaluasi organisasional (organizational evaluation), yang berfokus pada sejauh mana program memberikan dukungan bagi lembaga pelaksana, termasuk perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan serta kemungkinan perluasan peran lembaga tersebut.
3. Evaluasi substantif (substantive evaluation), yaitu evaluasi yang menilai apakah program telah mencapai tujuan yang ditetapkan serta dampak nyata program terhadap permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan.

Menurut Dilapanga & Rantung (2022), tujuan evaluasi kebijakan publik antara lain:

1. Menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan serta kinerja kebijakan yang dihasilkan.
2. Mengetahui besaran biaya yang digunakan serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan.
3. Mengukur jumlah dan kualitas input maupun output yang dihasilkan oleh suatu kebijakan.
4. Menilai dampak kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan.
5. Mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan pelaksanaan kebijakan melalui perbandingan antara target dan tujuan yang telah ditetapkan.

6. Tujuan akhir dari evaluasi yaitu memberikan umpan balik bagi proses kebijakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Berdasarkan berbagai pandangan terkait tujuan evaluasi kebijakan tadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian yang bersifat menyeluruh, baik dari aspek politis, kelembagaan, maupun substansi kebijakan itu sendiri. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan dan kinerja kebijakan tetapi juga untuk mengetahui efisiensi biaya dan manfaat, kualitas input dan output, serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan. Selain itu, evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan memberikan umpan balik sebagai dasar perbaikan serta penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang.

2.3.3 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses menilai suatu kebijakan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan diakhiri dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi apakah kebijakan perlu dilanjutkan, diperbaiki, dihentikan, atau dirancang ulang agar lebih bermanfaat.

Model evaluasi berbasis tujuan (*goal-based evaluation*) merupakan pendekatan evaluasi yang mengukur apakah tujuan suatu kebijakan, program, atau proyek dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Model ini pertama kali dipelopori oleh Ralph W. Tyler pada tahun 1949 kemudian konsep ini dikembangkan oleh tokoh lain seperti Scriven pada tahun 1991 yang menjelaskan bahwa evaluasi berbasis tujuan adalah penilaian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan suatu program, individu, atau produk. Dikutip dari Wirawan (2020), proses evaluasi berbasis tujuan melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan program, yaitu merumuskan tujuan dan menguraikannya dalam indikator kuantitatif maupun kualitatif yang dapat diukur.
2. Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang bisa diukur.
3. Mengembangkan metode dan instrumen evaluasi, seperti memilih metode kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi, serta menyusun alat pengumpulan data.
4. Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan, yaitu program harus dipastikan telah dijalankan hingga selesai dan seluruh layanan atau intervensinya sudah terlaksana. Pada tahap ini diperiksa apakah terdapat indikator pencapaian tujuan termasuk perubahan atau pengaruh yang diharapkan dari pelaksanaan program.
5. Menjaring dan menganalisis data/informasi program berdasarkan seluruh indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Kesimpulan, yaitu evaluator mengukur sejauh mana hasil program, pengaruh intervensi, atau perubahan yang muncul sesuai dengan objektif yang telah direncanakan sehingga dapat diketahui apakah terdapat ketimpangan antara tujuan dan realisasi.
7. mengambil keputusan terhadap program, misalnya melanjutkan program, menghentikannya, memperluas jangkauannya, atau memodifikasi program jika hasilnya belum sesuai harapan.

Berbeda dengan teori sebelumnya, model evaluasi CIPP memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja program. Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966 dan disempurnakan kembali pada tahun 2007. Ia merumuskan, mendefinisikan, dan menjelaskan fokus informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan (Stufflebeam, 2007)

Stufflebeam mengembangkan 10 checklist sebagai pedoman bagi evaluator dalam menerapkan model evaluasi CIPP yang berfungsi membantu merencanakan, melaksanakan, menilai, serta melaporkan evaluasi program secara sistematis. Adapun 10 checklist tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kesepakatan kontrak
Evaluators perlu terlebih dahulu menyusun kesepakatan formal dengan klien mengenai tujuan, ruang lingkup, dan prosedur evaluasi.
2. Evaluasi konteks
Evaluasi konteks dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, aset, serta masalah yang terdapat dalam lingkungan program.
3. Evaluasi masukan
Evaluasi input berfungsi menjaring dan menilai strategi, rencana pelaksanaan, sumber daya, serta alokasi anggaran.
4. Evaluasi proses
Evaluasi proses digunakan untuk memantau jalannya program, mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan, dan menilai aktivitas dalam program.
5. Evaluasi pengaruh (*impact evaluation*)
Evaluasi pengaruh bertujuan mengumpulkan dan menilai data mengenai sejauh mana program benar-benar menjangkau sasaran yang dituju.
6. Evaluasi efektivitas
Evaluasi efektivitas menilai seberapa besar manfaat (*outcomes*) yang diperoleh dari pelaksanaan program.
7. Evaluasi keberlanjutan (*sustainability evaluation*)
Evaluasi keberlanjutan fokus pada penilaian sejauh mana program mampu dipertahankan, diinstitutionalisasi, dan terus berjalan dalam jangka panjang setelah intervensi awal selesai.
8. Evaluasi transportabilitas (*transportability evaluation*)
Evaluasi transportabilitas mengkaji kemungkinan program dapat diadaptasi, direplikasi atau diterapkan dengan baik pada konteks atau lokasi lain.

9. Evaluasi meta (*metaevaluation*)

Evaluasi meta adalah penilaian mengenai kualitas dan kepatuhan proses evaluasi terhadap standar-standar evaluasi yang berlaku.

10. Sintesis laporan final

Sintesis laporan final menyatukan seluruh temuan evaluasi untuk memberikan gambaran komprehensif kepada semua pihak tentang apa yang direncanakan, dilaksanakan, dicapai, serta pelajaran penting yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Sementara itu, teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018) memaknai evaluasi sebagai proses penaksiran (*appraisal*), pemberian angka atau peringkat (*rating*), serta penilaian (*assessment*) terhadap nilai informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil atau kinerja kebijakan. Dalam hal ini, Dunn (2018) menetapkan enam kriteria sebagai pengukuran evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu alternatif kebijakan mampu mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan yang melandasi pelaksanaannya. Efektivitas yang erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, umumnya diukur berdasarkan keluaran berupa produk, layanan, atau nilai moneter yang dihasilkan. Indikator efektivitas dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH yang kemudian disesuaikan dengan konteks program P2K2. Indikator yang digunakan yaitu meningkatnya pengetahuan KPM setelah mengikuti P2K2, meningkatnya pemahaman KPM terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta PKH, terjadinya perubahan perilaku positif KPM setelah mengikuti P2K2, dan meningkatnya kemampuan KPM dalam mengenali dan memanfaatkan potensi diri serta lingkungan.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi berkaitan dengan besarnya usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Indikator efisiensi dalam

penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Indikator efisiensi yang digunakan yaitu ketepatan pelaksanaan P2K2 dan upaya pendamping PKH dalam pelaksanaan P2K2.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya keterkaitan antara alternatif kebijakan yang dipilih dengan hasil yang diharapkan. Indikator kecukupan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Indikator kecukupan yaitu P2K2 dapat mencukupi kebutuhan KPM sebagai sasaran program.

4. Perataan (*equity*)

Perataan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi dampak dan usaha kebijakan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan ditandai oleh pembagian manfaat kebijakan yang dilakukan secara adil. Indikator perataan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Indikator yang digunakan dalam perataan yaitu manfaat P2K2 didistribusikan secara sama untuk KPM.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini menjadi penting karena kebijakan yang telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan tetap dapat dinilai kurang berhasil apabila belum mampu menanggapi kebutuhan nyata dari kelompok sasaran yang seharusnya memperoleh manfaat kebijakan. Indikator responsivitas dalam penelitian ini

diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Untuk mengukur responsivitas digunakan indikator respon KPM terhadap pelaksanaan P2K2 dan semua keluhan KPM direspon oleh pendamping PKH.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan berkaitan erat dengan rasionalitas substantif karena penilaian terhadap ketepatan kebijakan tidak didasarkan pada satu kriteria tunggal, melainkan mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan. Ketepatan mengacu pada nilai tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari penetapan tujuan tersebut. Indikator ketepatan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Indikator yang digunakan yaitu program P2K2 sesuai dengan kebutuhan KPM dan pemahaman KPM pada pelaksanaan P2K2.

Berdasarkan beberapa model evaluasi kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memilih menggunakan teori evaluasi Dunn (2018) yang terdiri dari enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pemilihan teori ini dilakukan karena kerangka evaluasi kebijakan Dunn lebih fokus pada penilaian hasil dan dampak nyata dari pelaksanaan program sehingga sesuai untuk mengukur seberapa baik P2K2 benar-benar memberikan perubahan pada pengetahuan, perilaku, dan kesejahteraan KPM. Dengan demikian, teori evaluasi kebijakan Dunn dipandang paling tepat untuk menilai program P2K2.

2.4 Konsep Pemberdayaan

Konsep *empowerment* atau pemberdayaan pada dasarnya berkembang dari pemikiran Barat, khususnya Eropa, sejak tahun 1970-an dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan dipahami sebagai proses yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama melalui partisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan (*people centered development*) (Patilayia dkk., 2022). Dari sisi etimologi, pemberdayaan berasal

dari kata “daya” atau “*power*” yang menunjukkan adanya kekuatan dan kemampuan sehingga pemberdayaan dipandang sebagai proses atau upaya untuk memperkuat kelompok yang lemah (Yunus dkk., 2017). Sementara itu, menurut Husaini dan Marlinae, (2016) pemberdayaan merupakan rangkaian tindakan untuk membuat individu atau kelompok menjadi berdaya, yakni memiliki kapasitas untuk bertindak, berikhtiar, dan mengambil keputusan secara mandiri.

Menurut Mardikanto dalam Patilaiya dkk., (2022), tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Perbaiki kelembagaan (*better institution*): peningkatan kualitas kegiatan agar kelembagaan semakin kuat dan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perbaiki usaha (*better business*): kelembagaan yang baik diharapkan dapat memperbaiki usaha yang dijalankan sehingga memberikan manfaat bagi anggota dan lingkungan sekitar.
3. Perbaiki pendapatan (*better income*): peningkatan usaha diharapkan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.
4. Perbaiki lingkungan (*better environment*): peningkatan pendapatan memungkinkan perbaikan kondisi lingkungan fisik maupun sosial.
5. Perbaiki kehidupan (*better living*): pendapatan dan lingkungan yang baik akan meningkatkan standar hidup masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat (*better community*): meningkatnya kualitas hidup keluarga berkontribusi pada terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup warga melalui penguatan kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, serta kehidupan sosial sehingga terbentuk masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Menurut Patilaiya dkk. (2022), keberhasilan suatu program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh empat prinsip pokok yang perlu diterapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, masyarakat harus diperlakukan sebagai mitra yang memiliki posisi sejajar dengan lembaga pelaksana program. Kedua belah pihak dihargai sebagai pihak yang memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing sehingga dapat saling berbagi pengalaman, wawasan, dan dukungan.

2. Prinsip Partisipasi

Program hanya dapat mencapai tujuannya apabila masyarakat terlibat secara aktif. Keterlibatan ini mencakup proses merencanakan, menjalankan, memantau hingga menilai kegiatan. Pendamping tetap diperlukan untuk memberikan arahan namun prosesnya harus mendorong masyarakat semakin berdaya.

3. Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Keswadayaan menekankan bahwa masyarakat harus menghargai dan mengedepankan memiliki kemampuan dan potensi dahulu sebelum menerima bantuan luar. Masyarakat bukan dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki kapasitas tetapi mereka sesungguhnya memahami kondisi sosial, kendala usaha, serta sumber daya yang dimiliki. Bantuan eksternal hanya berfungsi sebagai pelengkap agar tidak membuat mereka bergantung.

4. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang agar tetap berjalan dalam jangka panjang. Pada awal kegiatan, pendamping mungkin berperan lebih dominan, namun secara bertahap peran ini harus berkurang seiring meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengelola kegiatan secara mandiri.

Merujuk pada prinsip-prinsip pemberdayaan di atas, dapat disimpulkan program pemberdayaan hanya akan efektif jika masyarakat diposisikan sebagai mitra yang setara, dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan, didorong untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki, serta diarahkan menuju kemandirian yang berkelanjutan tanpa ketergantungan pada bantuan luar.

2.5 Tinjauan P2K2

P2K2 merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan keluarga dalam PKH yang difasilitasi oleh pendamping sosial. Melalui kegiatan ini, KPM diberikan pembelajaran secara terstruktur dengan tujuan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga mendorong perubahan perilaku menuju kemandirian. P2K2 dilaksanakan secara rutin yaitu satu kali dalam sebulan dengan durasi sekitar 120 menit setiap pertemuan. Kegiatan dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan kesepakatan peserta. Dalam pelaksanaannya, pendamping sosial memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti modul, buku pintar, poster, flipchart, dan alat bantu lainnya agar proses belajar lebih interaktif dan efektif.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 41/3/OT.00.01/10/2024 tentang Petunjuk Teknis P2K2 PKH Tahun 2024, materi P2K2 disusun dalam bentuk enam modul utama yang menjadi pedoman pembelajaran bagi KPM. Keenam modul tersebut mencakup:

1. Modul pengasuhan dan pendidikan anak yang menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pola asuh yang baik, mendukung pendidikan anak usia dini hingga sekolah formal, serta membangun kedisiplinan, kebiasaan belajar, dan keterampilan sosial anak.
2. Modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha yang berisi pemahaman tentang bagaimana keluarga miskin dapat mengelola keuangan rumah tangga, menabung, mengakses kredit dengan aman, serta merintis usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

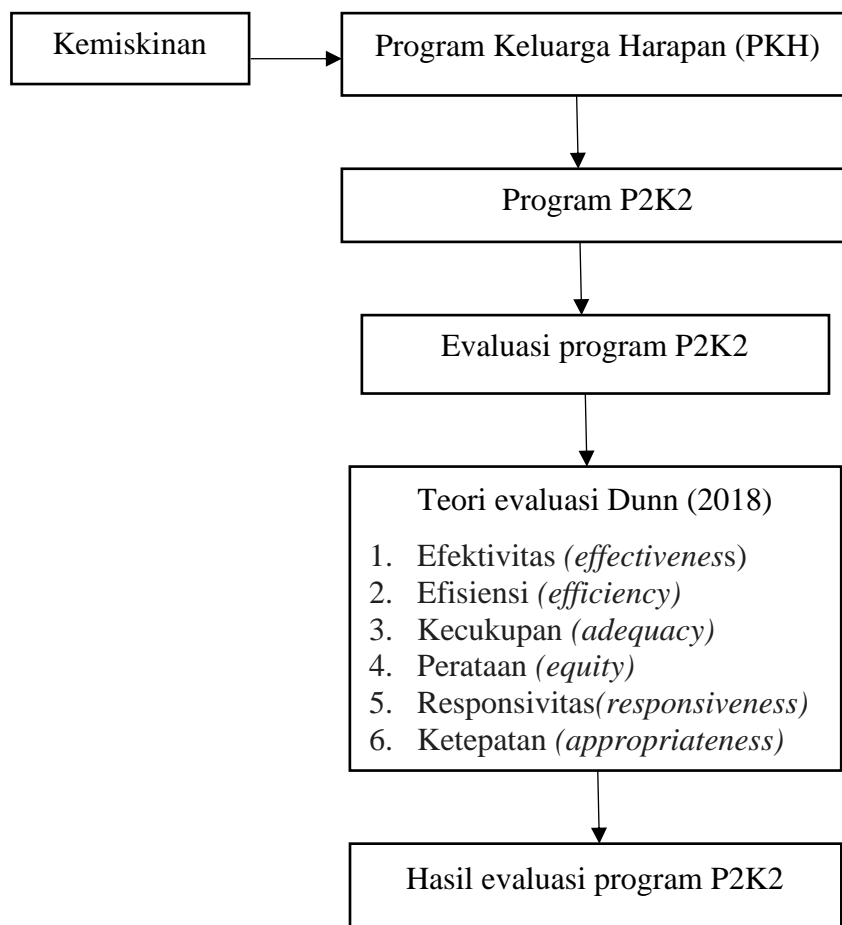
3. Modul kesehatan dan gizi yang berfokus pada perilaku hidup bersih dan sehat, pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan gizi, serta pentingnya pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan.
4. Modul perlindungan anak yang memberikan pengetahuan mengenai hak-hak anak, perlindungan dari kekerasan, serta penguatan peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.
5. Modul peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan disabilitas yang bertujuan membekali keluarga tentang layanan berbasis masyarakat untuk lansia dan penyandang disabilitas, seperti *home care* maupun *day care*.
6. Modul pencegahan dan penanganan stunting yang membahas pentingnya pemenuhan gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, konsumsi vitamin, serta upaya mencegah dampak jangka panjang kekurangan gizi.

Setiap modul dirancang agar KPM tidak hanya memahami konsepnya tetapi mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui modul keuangan keluarga diajarkan cara menabung dan mengatur pengeluaran sedangkan modul kesehatan dan gizi mendorong keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih, memanfaatkan layanan kesehatan, dan memperhatikan tumbuh kembang anak.

P2K2 bukan sekadar pertemuan formal yang dilaksanakan secara rutin melainkan suatu proses pemberdayaan yang mengarah pada peningkatan kemampuan keluarga dalam mengelola aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan secara berkelanjutan. Esensi dari P2K2 terletak pada hasil akhirnya, yaitu sejauh mana kegiatan tersebut mampu meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan KPM hingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Artinya, indikator keberhasilan P2K2 bukan hanya pada terlaksananya pertemuan setiap bulan tetapi pada perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan KPM setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut.

2.6. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2023), kerangka berpikir merupakan rangkaian pemikiran yang menggambarkan hubungan antarvariabel berdasarkan teori yang telah dibahas, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga terbentuk gambaran yang jelas mengenai variabel penelitian. Berikut ini kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 2. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

P2K2 merupakan program dari PKH yang dirancang sebagai upaya pemberdayaan keluarga miskin melalui pembelajaran terstruktur dan pendampingan sosial. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM dalam aspek pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan P2K2 yang dilakukan secara konsisten mampu memberikan dampak positif bagi KPM. Penelitian Beni (2023), Agusri dkk., (2022), serta Pratiwi dkk., (2025) membuktikan bahwa P2K2 berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas keluarga, perubahan perilaku, serta kesejahteraan KPM. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa P2K2 berpotensi mencapai tujuan kebijakan apabila dilaksanakan sesuai dengan pedoman.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan P2K2 menjadi penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Dalam penelitian ini, evaluasi pelaksanaan P2K2 dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018) yang meliputi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan sebagai dasar pengukuran untuk menilai pelaksanaan P2K2

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2023). Sementara itu, pendekatan deskriptif menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh secara akurat dan disusun secara sistematis (Sahir, 2021). Melalui metode ini, peneliti dapat mendeskripsikan dengan jelas dan terukur mengenai evaluasi program P2K2 di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.2.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan yang memberikan makna atau arti dari suatu konsep atau istilah tertentu. Definisi ini menggambarkan konsep secara umum dan menyeluruh, serta menjelaskan maksud dari istilah tersebut secara teoretis (Pasaribu dkk., 2022). Variabel pada penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu evaluasi program P2K2. Variabel tersebut dijelaskan berdasarkan teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2018).

Secara konseptual, evaluasi merupakan proses untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan serta untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Heryani, 2015). Dalam penelitian ini, evaluasi program P2K2 diukur menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yang meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Efektivitas: berkaitan dengan sejauh mana suatu alternatif kebijakan mampu mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan yang melandasi pelaksanaannya. Indikator efektivitas dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Indikator yang digunakan yaitu meningkatnya pengetahuan KPM setelah mengikuti P2K2, meningkatnya pemahaman KPM terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta PKH, terjadinya perubahan perilaku positif KPM setelah mengikuti P2K2, dan meningkatnya kemampuan KPM dalam mengenali dan memanfaatkan potensi diri serta lingkungan.
2. Efisiensi: berkaitan dengan besarnya usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Indikator efisiensi dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Indikator efisiensi yang digunakan yaitu ketepatan pelaksanaan P2K2 dan upaya pendamping PKH dalam pelaksanaan P2K2.
3. Kecukupan: berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan masalah. Indikator kecukupan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Indikator kecukupan yaitu P2K2 dapat mencukupi kebutuhan KPM sebagai sasaran program.
4. Perataan: berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi dampak dan usaha kebijakan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan

ditandai oleh pembagian manfaat kebijakan yang dilakukan secara adil. Indikator perataan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Indikator yang digunakan dalam perataan yaitu manfaat P2K2 didistribusikan secara sama untuk KPM.

5. Responsivitas: berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Indikator responsivitas dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Untuk mengukur responsivitas digunakan indikator respon KPM terhadap pelaksanaan P2K2 dan semua keluhan KPM direspon oleh pendamping PKH.
6. Ketepatan: berkaitan erat dengan rasionalitas substantif karena penilaian terhadap ketepatan kebijakan tidak didasarkan pada satu kriteria tunggal, melainkan mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan. Ketepatan mengacu pada nilai tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari penetapan tujuan tersebut. Indikator ketepatan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ayuningtias & Rahaju (2018) mengenai evaluasi program PKH. Indikator yang digunakan yaitu program P2K2 sesuai dengan kebutuhan KPM dan pemahaman KPM pada pelaksanaan P2K2.

Dengan demikian, evaluasi dalam penelitian ini dipandang sebagai sebuah instrumen penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan program P2K2 di Kelurahan Karang Maritim yang diukur melalui enam kriteria evaluasi (Dunn, 2018).

3.2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. Melalui definisi operasional, peneliti lain dapat memahami cara pengukuran variabel yang digunakan sehingga memungkinkan dilakukan penelitian serupa dengan prosedur yang sama atau dengan penyesuaian baru jika diperlukan (Pasaribu dkk., 2022). Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini secara rinci disajikan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Kode
Evaluasi program P2K2	Efektivitas	1. Meningkatnya pengetahuan KPM setelah mengikuti P2K2	1. Setelah mengikuti P2K2, saya mengetahui pola asuh positif kepada anak	P1
			2. Saya memperoleh pengetahuan cara mendidik anak tanpa kekerasan (seperti tidak membentak atau tidak memukul)	P2
			3. Saya memahami cara membedakan kebutuhan dengan keinginan dalam mengatur keuangan keluarga	P3
			4. Saya memperoleh pengetahuan cara mencegah stunting (gagal tumbuh) pada anak	P4
			5. Saya memperoleh pengetahuan cara memberikan perawatan yang layak bagi anggota keluarga lanjut usia	P5
			6. Saya memahami cara memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari	P6
			7. Saya memperoleh pengetahuan makanan bergizi seimbang (seperti porsi nasi, sayur, dan	P7

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Kode
			protein) untuk keluarga.	
		2. Meningkatnya pemahaman KPM terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta PKH	8. Saya memahami hak saya untuk mendapatkan materi edukasi P2K2 9. Saya memahami kewajiban saya untuk hadir di setiap pertemuan P2K2 10. Saya memahami peraturan yang berlaku selama menjadi peserta PKH	P8 P9 P10
		3. Terjadinya perubahan perilaku positif KPM setelah mengikuti P2K2	11. Saya mempraktikkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. 12. Saya tidak menggunakan kekerasan fisik (seperti memukul) saat menghadapi perilaku buruk anak di rumah. 13. Saya menyisihkan sebagian uang bantuan untuk ditabung sebagai dana darurat keluarga	P11 P12 P13
		4. Meningkatnya kemampuan KPM dalam mengenali dan memanfaatkan potensi diri serta lingkungan	14. Saya mengenali keterampilan yang ada pada diri saya untuk menambah penghasilan keluarga 15. Saya memanfaatkan fasilitas lingkungan sekitar (posyandu, puskesmas) untuk mendukung kesehatan keluarga	P14 P15
	Efisiensi	1. Ketepatan pelaksanaan P2K2	1. Pertemuan P2K2 dilaksanakan secara rutin satu bulan sekali 2. Pertemuan P2K2 dimulai sesuai dengan waktu yang disepakati 3. Durasi setiap sesi P2K2 digunakan	P16 P17 P18

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Kode
			untuk membahas modul pelajaran	
		2. Upaya pendamping PKH dalam pelaksanaan P2K2	4. Pendamping PKH menyampaikan materi menggunakan bahasa yang mudah saya mengerti	P19
			5. Pendamping PKH menggunakan alat bantu (seperti media gambar /flipchart) saat menjelaskan materi	P20
	Kecukupan	1. P2K2 dapat mencukupi kebutuhan sebagai program	1. Ketersediaan modul P2K2 membantu saya untuk belajar mandiri di luar waktu pertemuan	P21
			2. Materi yang diberikan dalam P2K2 sudah menjawab kebutuhan saya dalam meningkatkan taraf kesehatan keluarga (seperti pemenuhan gizi atau kebersihan)	P22
			3. Keterampilan yang diajarkan dalam P2K2 sudah cukup membekali saya untuk mengelola keuangan keluarga secara mandiri	P23
			4. Pengetahuan yang saya terima dari pertemuan P2K2 sudah memadai untuk mengatasi masalah pengasuhan anak di rumah	P24
	Perataan	1. Manfaat P2K2 didistribusikan secara sama untuk KPM	1. Saya memiliki kesempatan yang sama dengan KPM lain untuk menyampaikan pendapat atau kendala saat diskusi P2K2	P25
			2. Saya menerima materi P2K2 yang sama lengkapnya dengan apa yang	P26

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Kode
			diterima oleh anggota KPM lainnya	
			3. Saya mendapatkan bimbingan yang sama dari pendamping PKH seperti yang diberikan kepada anggota KPM lainnya	P27
			4. Saya mendapatkan bantuan yang sama dari pendamping PKH saat mengalami kesulitan mengisi formulir atau tugas pada modul, seperti KPM lainnya.	P28
			5. Saya mendapatkan informasi yang sama mengenai kesempatan untuk mengembangkan usaha (seperti informasi bantuan modal atau pelatihan tambahan) seperti anggota KPM lainnya	P29
	Responsi- vitas	1. Respon KPM terhadap pelaksanaan P2K2	1. Saya merasa bersemangat untuk menghadiri pertemuan P2K2 yang diadakan setiap bulan	P30
			2. Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan materi yang disampaikan oleh pendamping PKH di setiap pertemuan.	P31
			3. Saya langsung bertanya kepada pendamping jika ada penjelasan materi yang tidak saya pahami	P32
		2. Semua keluhan KPM direspon oleh pendamping PKH	4. Pendamping PKH menanggapi keluhan yang saya sampaikan	P33
			5. Pendamping PKH memberikan arahan yang jelas kepada saya ketika terjadi kendala dalam pelaksanaan P2K2	P34

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Kode
			6. Pendamping PKH menerima saran yang saya sampaikan	P35
			7. Pendamping PKH memberikan solusi permasalahan yang saya hadapi	P36
	Ketepatan	1. Program P2K2 sesuai dengan kebutuhan KPM	1. Materi yang disampaikan pada P2K2 dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi keluarga saya	P37
			2. Penjelasan pada materi P2K2 memberikan informasi baru yang sebelumnya tidak saya ketahui	P38
			3. Topik P2K2 yang dibahas memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dalam mengurus rumah tangga	P39
		2. Pemahaman KPM pada pelaksanaan P2K2	4. Saya memahami dengan jelas instruksi dan penjelasan yang disampaikan oleh pendamping PKH selama sesi P2K2	P40
			5. Saya mampu menjelaskan kembali poin-poin penting materi P2K2 kepada anggota keluarga saya di rumah	P41
			6. Saya memahami tujuan dari pelaksanaan pertemuan P2K2 setiap bulannya	P42
			7. Saya memahami kewajiban untuk mempraktikkan materi P2K2 di dalam kehidupan sehari-hari	P43

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026)

3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena menjadi kelurahan dengan jumlah KPM tertinggi, yaitu sebanyak 499 keluarga dari total 3.036 KPM di Kecamatan Panjang (Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program P2K2 di Kelurahan Karang Maritim guna mengetahui sebaik apa program ini telah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kemampuan serta kesejahteraan KPM di kelurahan tersebut.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Selain itu, populasi tidak hanya menunjuk pada jumlah individu yang diteliti melainkan juga mencakup seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut (Sugiyono, 2023). Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 499 KPM PKH di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Hasil penelitian yang diperoleh dari sampel tersebut nantinya dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *probability sampling* dimana semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel penelitian. Adapun jenis yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu metode penarikan sampel di mana peneliti mengambil sampel secara acak

sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang setara untuk dipilih menjadi responden penelitian (Sembiring dkk., 2024).

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Yamane karena jumlah populasi telah diketahui, dengan tingkat kesalahan (*sampling error*) sebesar 5% atau ($e = 0,05$). Adapun rumus Yamane dapat dituliskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) sebesar 5% (0,05)

(Sumber: Sugiyono, 2023)

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut, jumlah sampel yang dibutuhkan (n) dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{499}{1 + 499(0.05)^2} = \frac{499}{1 + 1,2475} = \frac{499}{2,2475} = 222,02$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Yamane, diperoleh hasil perhitungan sebesar 222,02. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 222 KPM PKH Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung sebagai responden penelitian.

3.5 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama, secara individu dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu KPM PKH Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data tersebut dapat berupa dokumen, catatan, maupun laporan historis, baik yang telah dipublikasikan maupun belum dan dimanfaatkan untuk mendukung proses analisis dalam penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden agar dijawab sesuai dengan kondisi atau pendapat mereka (Sugiyono, 2023).

Kuesioner penelitian disusun menggunakan google form dan disebarikan melalui dua metode yaitu secara daring dan luring. Pada metode daring, tautan kuesioner dibagikan melalui aplikasi WhatsApp dengan bantuan pendamping PKH yang kemudian meneruskannya kepada ketua kelompok KPM untuk disebarikan kepada anggota KPM PKH di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang. Secara luring, peneliti menemui langsung para KPM untuk meminta kesediaan mereka mengisi kuisisioner secara manual.

3.7 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala likert sebagai jenis skala pengukurannya. Menurut Sugiyono (2023), skala likert berfungsi untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial tersebut telah ditentukan secara spesifik oleh peneliti dan selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dalam pelaksanaannya, variabel yang akan diukur terlebih dahulu diuraikan menjadi beberapa indikator. Indikator tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan item-item pernyataan pada instrumen penelitian. Setiap pernyataan disertai dengan empat alternatif jawaban, yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Pilihan jawaban beserta bobot penilaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Skor Pengukuran Skala Likert

No	Keterangan	Jawaban	Nilai
1.	SS	Sangat Setuju	4
2.	S	Setuju	3
3.	TS	Tidak Setuju	2
4.	STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2023

Penggunaan skala likert dengan empat (4) skala memiliki keunggulan dalam meningkatkan ketepatan data penelitian karena kategori jawaban uncident (ragu-ragu) dianggap memiliki makna ganda menunjukkan bahwa responden belum menentukan pilihannya secara pasti (Cahyani dkk., 2020). Oleh karena itu, opsi uncident tidak digunakan agar tidak mengurangi kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh dari responden.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengkategorian hasil evaluasi program guna mengetahui tingkat penilaian responden terhadap program yang diteliti. Penentuan batas pada setiap kategori dilakukan dengan menggunakan rumus interval kelas yang mengacu pada Nuryadi dkk., (2017). Skala pengukuran dalam kuesioner menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya, dalam analisis deskriptif, nilai rata-rata yang diperoleh diinterpretasikan ke dalam kategori penilaian variabel, yaitu sangat tidak baik hingga sangat baik, guna

memudahkan penafsiran terhadap kondisi variabel yang diteliti. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan interval kategori tersebut adalah sebagai berikut.

$$C_i = \frac{R}{K}$$

$$C_i = \frac{4 - 1}{4}$$

$$C_i = 0,75$$

Keterangan:

C_i = interval kelas

R = selisih nilai data tertinggi dengan nilai data terendah (range)

K = jumlah kelas

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh batasan kategori pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Kategori Evaluasi Program

No.	Interval	Kategori
1.	1 - 1,75	Sangat Tidak Baik
2.	1,76 - 2,5	Tidak Baik
3.	2,51 - 3,25	Baik
4.	3,26 - 4	Sangat Baik

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

3.8 Uji Prasyarat Instrumen

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan tingkat ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Artinya, instrumen yang digunakan dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat (Sembiring dkk., 2024). Rumus yang digunakan untuk uji validitas adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi (r hitung)

N = Jumlah responden

X = Skor pertanyaan

Y = Skor total

Untuk mempercepat proses uji validitas, peneliti menggunakan *software IBM SPSS Statistics 25* dengan bantuan komputer. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, penentuan kevalidan instrumen didasarkan pada kriteria berikut:

1. Apabila nilai r hitung lebih besar atau sama dengan nilai r tabel, maka instrumen dinyatakan valid.
2. Apabila nilai r hitung lebih kecil daripada nilai r tabel, maka instrumen dinyatakan tidak valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode	R Tabel	R Hitung	Keterangan
Evaluasi program P2K2	P1	0,361	0,886	Valid
	P2	0,361	0,721	Valid
	P3	0,361	0,702	Valid
	P4	0,361	0,864	Valid
	P5	0,361	0,864	Valid
	P6	0,361	0,411	Valid
	P7	0,361	0,888	Valid
	P8	0,361	0,754	Valid
	P9	0,361	0,790	Valid
	P10	0,361	0,908	Valid
	P11	0,361	0,819	Valid
	P12	0,361	0,834	Valid
	P13	0,361	0,853	Valid
	P14	0,361	0,815	Valid
	P15	0,361	0,646	Valid

Variabel	Kode	R Tabel	R Hitung	Keterangan
	P16	0,361	0,829	Valid
	P17	0,361	0,820	Valid
	P18	0,361	0,866	Valid
	P19	0,361	0,880	Valid
	P20	0,361	0,744	Valid
	P21	0,361	0,901	Valid
	P22	0,361	0,863	Valid
	P23	0,361	0,864	Valid
	P24	0,361	0,856	Valid
	P25	0,361	0,816	Valid
	P26	0,361	0,893	Valid
	P27	0,361	0,878	Valid
	P28	0,361	0,908	Valid
	P29	0,361	0,810	Valid
	P30	0,361	0,580	Valid
	P31	0,361	0,841	Valid
	P32	0,361	0,733	Valid
	P33	0,361	0,688	Valid
	P34	0,361	0,715	Valid
	P35	0,361	0,751	Valid
	P36	0,361	0,741	Valid
	P37	0,361	0,703	Valid
	P38	0,361	0,772	Valid
	P39	0,361	0,739	Valid
	P40	0,361	0,755	Valid
	P41	0,361	0,721	Valid
	P42	0,361	0,379	Valid
	P43	0,361	0,592	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada tabel 6 pada variabel evaluasi program P2K2, seluruh item pernyataan menunjukkan nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Oleh karena itu, seluruh pernyataan dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid sehingga layak digunakan untuk pengukuran variabel tersebut.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur mampu memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan apakah instrumen yang digunakan akan menghasilkan data yang tetap stabil apabila pengukuran dilakukan secara berulang (Sembiring dkk., 2024). Uji reliabilitas dalam penelitian ini didasarkan pada nilai *Cronbach's Alpha* dengan mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Guilford dalam Sembiring dkk., (2024). Adapun kategori tingkat reliabilitas instrumen dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,81–1,00 menunjukkan reliabilitas sangat tinggi.
2. Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,61–0,80 menunjukkan reliabilitas tinggi.
3. Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,41–0,60 menunjukkan reliabilitas sedang.
4. Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,21–0,40 menunjukkan reliabilitas rendah.
5. Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,00–0,20 menunjukkan reliabilitas sangat rendah.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

α = Koefisien reliabilitas

k = Jumlah pertanyaan

$\sum_{i=1}^k \sigma_i^2$ = Jumlah varian butir

σ_t^2 = Varian skor total

Untuk mempercepat proses uji reliabilitas, peneliti menggunakan *software IBM SPSS Statistics 25* dengan bantuan komputer.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Keterangan
Evaluasi program P2K2	0,983	43	Reliabel

Berdasarkan tabel 7, hasil uji reliabilitas pada variabel evaluasi program P2K2 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan masuk kategori reliabilitas sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui *Cronbach's Alpha* sebesar 0,983 sehingga instrumen dinilai reliabel.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data dari responden ataupun sumber lainnya terkumpul. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *software IBM SPSS Statistics 25*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif sebagai teknik untuk menganalisis data. Analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan suatu fenomena atau objek penelitian secara rinci dan sistematis (Junaidi dkk., 2024). Analisis deskriptif yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran pemusatan data

Ukuran pemusatan data digunakan untuk mengetahui letak nilai pusat atau titik tengah dari suatu kumpulan data. Ukuran pemusatan ini meliputi rata-rata (mean), nilai tengah (median), dan nilai yang paling sering muncul (modus). Namun, dalam penelitian ini ukuran pemusatan data yang digunakan adalah rata-rata (mean) karena mampu memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap keseluruhan data, terutama pada data skala likert yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Ukuran sebaran data

Ukuran sebaran data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar. Tujuan dari ukuran sebaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat

keragaman atau variasi data yang ada. Dalam penelitian ini, ukuran sebaran data yang digunakan adalah deviasi standar (*standard deviation*). Deviasi standar digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran atau variasi nilai terhadap rata-ratanya dalam suatu kumpulan data.

3. Tabel Penyajian Data

Penyajian data melalui tabel merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur. Visualisasi data tidak hanya membantu dalam menampilkan hasil penelitian secara sistematis, tetapi juga memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan. Melalui tabel, data dapat disajikan secara jelas dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan frekuensi maupun nilai rata-rata dari setiap variabel atau indikator yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah membandingkan antar kategori serta melihat kecenderungan data secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan menggunakan tabel yang memuat distribusi jawaban responden serta hasil perhitungan nilai rata-rata (mean) pada setiap indikator dan dimensi yang diteliti.

4. Diagram Lingkaran (*Pie Chart*)

Diagram lingkaran (*pie chart*) merupakan grafik yang digunakan untuk menampilkan proporsi atau persentase masing-masing bagian dalam suatu keseluruhan secara visual melalui pembagian sektor pada lingkaran.

Penggunaan *pie chart* dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan penyajian dan pemahaman data, khususnya dalam melihat perbandingan proporsi kategori jawaban responden. Dengan visualisasi ini, pembaca dapat dengan cepat memahami distribusi data serta mengetahui bagian mana yang paling dominan dalam hasil penelitian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program P2K2 di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung telah berjalan sangat baik, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata variabel evaluasi sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa program P2K2 telah mampu memberikan manfaat bagi KPM, baik dalam meningkatkan pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku. Dari enam dimensi yang dievaluasi, terdapat empat dimensi yang meliputi dimensi perataan (*mean* 3,70), dimensi ketepatan (*mean* 3,67), dimensi responsivitas (*mean* 3,65), dan dimensi efisiensi (*mean* 3,58) dinilai sudah berjalan sangat baik karena angka jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju sangat kecil, yaitu berkisar antara 1,4% - 4,1% responden.

Selanjutnya, dimensi efektivitas memperoleh *mean* sebesar 3,60 kategori sangat baik, namun terdapat 23% responden (51 orang) yang memberikan jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju karena merasa belum mampu mengenali keterampilan dalam diri mereka. Adapun dimensi kecukupan memperoleh *mean* terendah sebesar 3,48, yang dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada pernyataan keterampilan mengelola keuangan keluarga secara mandiri, di mana terdapat 14,4% responden (32 orang) yang memberikan jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan KPM dalam peningkatan kapasitas keterampilan dan pengelolaan keuangan keluarga melalui program P2K2 masih belum optimal, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan monitoring secara berkala agar program P2K2 tidak hanya mendorong perubahan perilaku sosial, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi KPM.
2. Pendamping PKH disarankan untuk memperkuat penyampaian modul pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha melalui metode yang lebih aplikatif, seperti simulasi pencatatan pengeluaran harian, sesi tanya jawab mengenai potensi keterampilan KPM, diskusi potensi usaha, serta pendampingan pengembangan keterampilan agar KPM lebih mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya.
3. KPM PKH disarankan untuk secara aktif mencatat poin-poin penting dari setiap sesi P2K2 dan mendiskusikannya bersama anggota keluarga di rumah, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji program P2K2 menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed methods guna menggali secara lebih mendalam faktor-faktor penghambat kemandirian ekonomi KPM, khususnya pada aspek kecukupan materi pengelolaan keuangan dan pengenalan potensi diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusrini, T., Adib, M. A., & Sarbanum, A. (2022). Strategi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dalam Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. *Unisan Jurnal*, 1(3), 943–952. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.
- Akbar, N., & Sutoyo, M. A. H. (2022). Pelaksanaan Kegiatan P2K2 Untuk Pengelolaan Keuangan dan Rencana Usaha Keluarga di Masa Pandemi. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 126-133. <https://doi.org/10.35870/ajad.v2i2.84>.
- Apriliani, S., Yahya, M., Fahmi Maulana Idris, M., Latifatul Ulfah, H., Azmi, D., Nursholeh, A., & Kautsar Ilmi, L. (2025). Analisis Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 579–584. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15717987>.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ayuningtias, D., & Rahaju, T. (2018). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Beni, S. (2023). Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dalam Mempercepat Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i2.97>.
- BPS Indonesia. (2025, September 1). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>.

- BPS Indonesia. (2025, September 1). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>.
- BPS Provinsi Lampung. (2025, September 1). *Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Maret 2025 turun menjadi 10,00 persen*. <https://lampung.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1617/persentase-penduduk-miskin-provinsi-lampung-maret-2025-turun-menjadi-10-00-persen-.html>.
- Cahyani, T. N. D., Pradnyana, I. M. A., & Sugihartini, N. (2020). Pengukuran Tingkat Kesiapan Pengguna Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan Dasar Menggunakan Technology Readiness Index (Tri) (Studi Kasus: Sekolah Dasar Di Kecamatan Sukasada). *Karmapati*, 9(2), 88-95.
- Dilapanga, A. R., & Rantung, M. I. R. (2022). *Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Ed-6). Inggris: Routledge.
- Engkus. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Jawa Barat: PT. Kimshafi Alung Cipta
- Heryani, A. (2015). Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota. *E-JKPP Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*. 1(2), 47-62.
- Husaini, & Marlinae, L. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Kalimantan Selatan: Repo Dosen ULM.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Junaidi, A., Ratar, M., Lestaluhu, S. A., & Handayani, V. A. (2024). *Buku Referensi Statistik*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 41/3/OT.00.01/10/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Program Keluarga Harapan Tahun 2024.
- Khasanah, U. (2024). *Kebijakan Publik (Teori dan Implementasi)*. Metro: PT. Nafal Global Nusantara.
- Lestarie, T., Khoirinka, R. P., Zaqiyah, N., Putri, S., Dewi, L., Desidin, A. Q., Rosidin, E. R. P., Alviansyah, M. R., & Nurlaila, N. (2024). Evaluasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Unit Pelaksana

Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Tasikmalaya Sektor Wilayah Cipedes Dan Mangkubumi. *NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 25–35. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v4i1.2241>.

- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Repository Universitas Panca Marga.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Pasaribu, S. B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Banten: Media Edu Pustaka.
- Patilaiya, H. La, Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiyati, S., Supriatna, A., Harto, B., Siburian, U. D., Mahaza, Maesarini, I. W., & Hapsari, T. D. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Permana, I. (2023). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Prasetyia, F., & Pangestuty, F. W. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Pendekatan Ekonomi dan Studi Kasus*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Pratiwi, D., Lubis, M. A., & Putri, M. (2025). Dampak Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Memenuhi Kebutuhan Lanjut Usia di Desa Kotasan. *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)*, 4(1), 52–61.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sembiring, T. Br., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute.
- Stufflebeam, D. L. (2007). *CIPP evaluation model checklist: A tool for applying the CIPP model to assess long-term enterprises*. Kalamazoo: Western Michigan University Evaluation Center.

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, Cv.
- Sukei. (2020). Analisis Pengaruh Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (P2K2) terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) di Jawa Timur. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 14(1), 16–26. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i1.340>.
- Syafriyani, I. (2023). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Triana, L., Munandar, A., Adhrianti, L., Bangsu, T., & Yunisiliah. (2025). Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. *Journal of Science and Social Research*, 8(2), 1885–1894. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.
- Triano, H. M., & Machdum, S. V. (2023). Pemberdayaan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 505–517. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.3105>.
- Umasugi, M. (2023). Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pulau Hiri. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1512-1527. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2111>.
- Wijaya, S. (2019). *Gerakan Literasi Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2) Masyarakat Pra Sejahtera*. 4(2), 131–145.
- Wirawan. (2020). *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi Dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus, S., Suadi, & Fadli. (2017). *Modul Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Aceh: Bandar Publishing.